

NASKAH PUBLIKASI

EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017-2018



Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Dr. Tini Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

**EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DI DESA
SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017-
2018**

Rahma Zayyinil Addina
rza.ama14@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani Tahun 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani. Teori evaluasi yang digunakan adalah teori evaluasi program Daniel Stufflebeam yang terdiri dari empat indikator yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tujuan yang ditetapkan dalam program destana telah sesuai untuk menjawab permasalahan risiko ancaman bencana yang ada di Desa Srimartani. (2) Input berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, peraturan desa tentang penanggulangan bencana, dokumen perencanaan RPB dan rencana kontinjensi longsor, serta integrasi RPB ke dalam rencana kerja pemerintah desa telah dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang belum disusun adalah rencana aksi komunitas dan rencana kontinjensi untuk jenis bencana lain. (3) Proses pelaksanaan kegiatan destana telah berjalan walaupun belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut terdapat pada sejumlah relawan FPRB tidak aktif, belum berjalanya kegiatan monitoring dan evaluasi, serta belum adanya laporan kegiatan dan laporan keuangan program destana sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. (4) Pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani telah menunjukkan hasil dan memberikan dampak kepada sebagian masyarakat Desa Srimartani. Hasil dari berjalannya program destana diantaranya adalah berjalannya kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dan relawan seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi, serta terdapat sistem peringatan dini. Dampak dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat.

Kata kunci: evaluasi, desa tangguh bencana, kesiapsiagaan, manajemen bencana

PENDAHULUAN

Indonesia dilihat dari kondisi geologi berada pada wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang menyebabkan rawan terhadap kejadian bencana. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), menyajikan data berupa tren kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir (2009-2018), berdasarkan data tersebut setiap tahun rata-rata terdapat 1.768 kejadian bencana di Indonesia (BNPB, 2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh bencana rata-rata mencapai Rp 22 triliun setiap tahun, belum termasuk dengan kerugian jiwa (Tempo, 2018).

Pemerintah Indonesia, melalui Badan BNPB mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Latar belakang pembentukan program destana adalah melihat realitas ancaman bencana di Indonesia dan pentingnya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengurangan resiko bencana penting dilakukan karena sebelum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana resmi ditetapkan, penanggulangan bencana di Indonesia hanya berfokus pada kegiatan tanggap darurat yang dinilai tidak efektif untuk

mengurangi dampak bencana. Undang-undang No 24 tahun 2007 telah merubah paradigma menjadi penanggulangan bencana yang komprehensif melakukan seluruh kegiatan dari pra bencana, tanggap darurat hingga pemulihan (Fatimahsyam, 2018). Penetapan Perka BNPB No 1 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk lebih fokus pada tahap pencegahan bencana, melalui program destana.

Pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menurut Perka BNPB adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memahami kondisi dan ancaman bencana di wilayahnya, serta masyarakat yang dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana melalui sumber daya yang ada. Subjek atau pelaku utama dari program destana ini adalah masyarakat.

Sasaran program desa tangguh bencana adalah desa yang masuk dalam kategori rawan bencana. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana. Menurut Indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Bantul menempati posisi 82 dari 495 kabupaten di Indonesia dengan kelas risiko tinggi (Merryana Anggriani, 2018).

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Bantul adalah bencana tanah longsor dan puting beliung yaitu sebanyak 32 kali. Bencana tanah longsor merupakan bencana yang menjadi salah satu ancaman terbesar di Kabupaten Bantul. Hasil kajian BPBD Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa terdapat 15 desa di 5 kecamatan yang masuk dalam kategori zona merah bahaya longsor yang artinya memiliki risiko tinggi terhadap longsor diantaranya Desa Srimartani.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Srimartani telah resmi menjadi desa tangguh bencana pada November 2017. Desa Srimartani ditetapkan menjadi destana karena Desa Srimartani merupakan salah satu diantara 15 desa yang berada di zona merah ancaman longsor. Desa Srimartani memiliki total 158 rumah, 162 KK, dan 562 jiwa yang memiliki risiko tinggi terkena bencana tanah longsor.

Selain risiko tinggi terhadap ancaman bencana tanah longsor, faktor

lain yang menjadikan Desa Srimartani dipilih sebagai lokasi penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana. Desa Srimartani diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yaitu BPBD Bantul menjadi destana pada November 2017, tetapi FPRB Desa Srimartani telah dibentuk sejak tahun 2012 dan telah melakukan beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana. Desa Srimartani juga merupakan wakil Kabupaten Bantul dalam lomba desa tangguh bencana se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018.

Maka dari itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana program desa tangguh bencana dilaksanakan, melalui indikator evaluasi. Evaluasi membantu melihat sejauh mana tujuan program telah tercapai dan dimana letak kekurangan program, sehingga dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Program Destana di Srimartani juga perlu dievaluasi untuk melihat sudah sejauh mana masyarakat memahami kondisi ancaman bencana dan melakukan upaya mandiri untuk mengurangi risiko ancaman bencana yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani. Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit analisa data dalam penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimartani, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani, dan masyarakat Desa Srimartani.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan proses analisa data kualitatif dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani tahun 2017-2018 ini merujuk pada teori Daniel Stufflebeam tentang evaluasi program. Daniel Stufflebeam menilai sebuah program melalui 4 indikator yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*. Sedangkan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program desa tangguh

bencana, merujuk pada kriteria umum desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012

1. Konteks (*Context*)

Context dalam evaluasi program menurut Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai lingkungan program atau aspek-aspek yang melatar belakangi program. Parameter *context* pada evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani adalah latar belakang program dan tujuan program. Berdasarkan parameter tersebut maka dapat dianalisis apakah tujuan program destana di Desa Srimartani telah sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu risiko ancaman bencana di Desa Srimartani.

a. Latar belakang program destana di Desa Srimartani

Pertama, potensi ancaman bencana. BPBD Bantul bersama Desa Srimartani telah melakukan kajian risiko bencana pada November 2017. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu kondisi wilayah dan riwayat kejadian bencana di Desa Srimartani. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Srimartani memiliki 6 jenis potensi ancaman bencana. Berdasarkan penilaian potensi ancaman bencana, menunjukkan bahwa Desa Srimartani memiliki ancaman rendah terhadap erupsi; memiliki ancaman sedang terhadap banjir, kebakaran, gempa bumi,

dan longsor; serta memiliki potensi ancaman tinggi terhadap bencana angin kencang (FPRB Srimartani, 2018).

Kedua, riwayat kejadian bencana di Desa Srimartani. Berdasarkan data riwayat kejadian bencana di Desa Srimartani tahun 2006-2018, bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana tanah longsor dan angin kencang yaitu sebanyak 14 kali kejadian. Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian potensi ancaman bencana Desa Srimartani bahwa bencana angin kencang merupakan bencana yang memiliki potensi ancaman terbesar diikuti bencana longsor. Bencana tanah longsor dan angin kencang terjadi hampir setiap tahun saat musim hujan di beberapa dusun yang berada pada dataran tinggi dengan kondisi tanah labil.

Ketiga, kesiapan Desa Srimartani dalam menjalankan program destana. Pembentukan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani merupakan inisiasi dari pihak BPBD dan Desa Srimartani. Kesiapan pemerintah desa dan FPRB terbentuk melalui proses yang cukup panjang dimulai pada tahun 2010 saat Desa Srimartani memiliki Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB). Jadi jauh sebelum program destana dibentuk, Desa Srimartani telah memiliki organisasi yang bergerak pada pengurangan risiko bencana.

Pada tahun 2010-2012 bernama OPRB yang diinisiasi oleh *Java Recovery Fund* (JRF). Pada tahun 2012 program dari JRF selesai kemudian dibentuk FPRB. FPRB menjadi tempat bagi masyarakat khususnya relawan untuk berpartisipasi pada kegiatan kebencanaan, baik pengurangan risiko maupun kegiatan tanggap darurat seperti saat erupsi merapi.

Pembentukan desa tangguh bencana di Desa Srimartani dilaksanakan pada November 2017, melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) antara fasilitator dari BPBD Kabupaten Bantul dengan pemerintah Desa Srimartani dan FPRB Desa Srimartani yang dilakukan sebanyak 15 kali pertemuan. Pembahasan pada rakornis adalah kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi longsor, hingga pemberian materi kepada relawan FPRB. Hasil rakornis di dokumentasikan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Desa Srimartani 2018-2021. Setelah rakornis, kemudian dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Srimartani sebanyak 2 kali.

b. Tujuan program destana di Desa Srimartani

Tujuan destana menurut Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani pada

wawancara tanggal 2 Mei 2019 menyampaikan bahwa inti dari program destana adalah membangun sebuah kapasitas masyarakat.

“Ada rumus risiko bencana itu bisa dikurangi apabila kapasitas masyarakat dan relawan dinaikkan sementara kerentanan juga dikurangi. Yang bisa kita dilakukan adalah meningkatkan kapasitas, kalau kerentanan itu sulit. Sehingga kapasitas yang coba kita angkat.” (Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Jadi tujuan dari program destana adalah terciptanya kemandirian desa yang dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas. Tujuan kemandirian yang ingin dicapai menurut Amat Yani adalah masyarakat paham tentang bencana, sadar bahwa mereka berada di kawasan rawan, masyarakat menjadi waspada bisa melihat tanda-tanda, ketika ada tanda-tanda masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian saat ada kejadian bisa melakukan upaya penanggulangan secara mandiri tidak tergantung relawan dan pemerintah. Setelah terjadi bencana masyarakat dapat bangkit.

Tujuan kegiatan destana yang disampaikan ketua FPRB Srimartani sesuai dengan pendapat C.M Shreve dan I. Kelman dalam (IIR dan Give 2 Asia, 2017) yang mengatakan bahwa cara yang paling efisien untuk menghilangkan dampak negatif bencana adalah melalui

investasi dalam upaya membangun ketahanan masyarakat dan program pengurangan risiko bencana. Program destana di Desa Srimartani merupakan program pengurangan risiko bencana, dengan fokus melaksanakan kegiatan peningkatan masyarakat dan relawan yang berfungsi untuk membangun ketahanan atau ketangguhan masyarakat. Jadi tujuan program destana di Desa Srimartani dinilai telah tepat.

2. Masukan (*Input*)

Input dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya dan strategi telah disiapkan untuk keberlangsungan program, karena kualitas input sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program.

a. Sumber daya

Pertama, pada parameter sumber daya manusia telah dibentuk kelembagaan berupa FPRB Srimartani yang menjadi pelaksana utama kegiatan destana sejak tahun 2012. Berikut merupakan pemangku kepentingan yang terlibat :



Gambar 1. Stakeholders dalam Program Destana di Desa Srimartani

BPBD Bantul menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dengan baik dimulai pada saat pembentukan hingga pengembangan desa. Pemerintah Desa Srimartani juga telah menjalankan fungsinya untuk memasukan kegiatan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana kerja pemerintah dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program. Masyarakat berperan dengan cara berpartisipasi dalam program desa. Sedangkan FPRB Srimartani perlu untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya karena banyak relawan yang tidak aktif. Jumlah relawan yang hadir saat pertemuan rutin hanya 10 dan ketika kegiatan peningkatan kapasitas 20-25 orang dari total 59 relawan.

Kedua, sumber dana untuk program desa di tahun 2017 dan 2018 bersumber dari APBD Bantul dan APBDes Srimartani. Pada tahun 2017 anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul adalah Rp 90.000.000,00 untuk pembentukan dan Rp 20.000.000,00 untuk dana pengembangan. Pemerintah Desa Srimartani juga menganggarkan dana sebesar Rp 14.125.000,00 dengan rincian sebesar Rp 4.225.000,00 untuk keperluan pembentukan desa seperti konsumsi rapat dan honorarium panitia serta Rp 9.900.000 untuk keperluan pembelian peralatan.

Pemerintah Desa Srimartani pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Desa Srimartani No 2 Tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang bersumber dari APBDesa Srimartani. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kesiapsiagaan sebesar Rp 61.703.160,00 dan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat adalah Rp 16.245.342,00. Alokasi anggaran dari APBDesa Srimartani untuk kegiatan kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pemerintah desa untuk mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana.

Ketiga, sarana prasarana. Pemerintah desa setiap tahun menganggarkan pembelian alat menggunakan anggaran dari APBDesa. Mekanisme penganggaran peralatan dilakukan dengan cara FPRB mengajukan usulan kepada pemerintah desa pada saat musyawarah rencana pembangunan desa, apabila mencapai kesepakatan maka akan dianggarkan dalam APBDesa Srimartani. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.900.000,00, kemudian di tahun 2018 sebesar Rp 9.000.000,00 untuk pembelian alat komunikasi serta Rp 28.000.000,00 untuk pembelian peralatan mesin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB dan observasi terhadap

peralatan relawan FPRB pada 19 Mei 2019. Inventaris peralatan FPRB Desa Srimartani saat ini dapat dikatakan cukup untuk mendukung kinerja relawan dalam melaksanakan tugasnya. Peralatan yang ada di sekretariat FPRB cukup lengkap dan masih dalam kondisi baik.

b. Strategi

Pertama, peraturan Desa Srimartani tentang penanggulangan bencana. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2017. Peraturan Desa Srimartani tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini telah digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana.

Kedua, dokumen perencanaan kebencanaan merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan destana.

Tabel 1. Dokumen Perencanaan Kebencanaan di Desa Srimartani

No	Dokumen	Ketersediaan	Masa berlaku
1	Kajian risiko bencana	Ada, disusun pada November 2017	5 tahun 2018-2022
2	RPB	Ada, disusun pada November 2017	5 tahun 2018-2022
3	RAK	Belum disusun	-
4	Renkon	Ada, disusun pada November 2017. Baru rencana kontinjensi untuk bencana longsor	4 tahun 2018-2021

Ketiga, integrasi atau pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan bukti bahwa kegiatan penanggulangan bencana menjadi salah satu agenda pembangunan desa yang diprioritaskan. Kegiatan penanggulangan bencana khususnya pengembangan kesiapsiagaan masyarakat telah menjadi salah satu program kerja pemerintah Desa Srimartani yang dibuktikan dengan RKP Desa Srimartani tahun 2017 dan APBDes Desa Srimartani 2018.

Keempat, Pemerintah Desa Srimartani telah menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program destana tahun 2017 dan 2018, beberapa organisasi atau lembaga tersebut adalah :

- 1) Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kecamatan Piyungan. FPRB Desa Srimartani bekerjasama dengan RAPI Piyungan untuk keperluan komunikasi dan informasi. Bentuk kerjasama yang dijalin adalah penggunaan jalur komunikasi radio resmi milik RAPI untuk keperluan komunikasi relawan FPRB Srimartani yang menggunakan *handy talkie* saat kejadian bencana.
- 2) Palang Merah Indonesia (PMI). Pemerintah Desa Srimartani

bekerjasama dengan PMI dalam peningkatan kapasitas relawan. PMI menjadi pemateri pada saat kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk relawan FPRB Srimartani, seperti kegiatan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (ppgd).

- 3) Puskesmas Piyungan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Srimartani untuk keperluan tenaga kesehatan pada saat kegiatan simulasi bencana dan keadaan darurat.
- 4) Kepolisian dan koramil yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan simulasi dan tanggap darurat di Desa Srimartani.

3. Proses (*Process*)

Proses dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan atau dengan kata lain menilai bagaimana implemementasi dari sebuah perencanaan. Indikator proses pada evaluasi program destana di Desa Srimartani ini juga bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Desa Srimartani serta hambatan dalam pelaksanaan program destana.

a. Persiapan program destana

Proses persiapan pelaksanaan program destana dimulai pada tahap

musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes). Pada musrenbangdes Srimartani tahun 2017 dan 2018 disepakati adanya kegiatan destana, yaitu kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran dari APBDDesa Srimartani. Pembahasan mengenai bentuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan dibahas melalui rapat pada pertemuan rutin relawan FPRB. Kemudian informasi mengenai kegiatan disampaikan ke masyarakat melalui dusun.

b. Pelaksanaan program destana

Pertama, kesesuaian pelaksanaan dengan RPB. Implementasi kegiatan destana di tahun 2017 dan 2018 telah sesuai dengan rencana kesiapsiagaan dalam dokumen RPB. Tetapi kegiatan pengembangan kesiapsiagaan pada tahun 2017 baru fokus pada bencana tanah longsor, kemudian di tahun 2018 fokus pada longsor dan banjir. Sedangkan kesiapsiagaan untuk bencana kebakaran lahan, angin kencang, gempa bumi dan erupsi belum dilaksanakan.

Evaluasi akan lebih mudah dilakukan apabila Desa Srimartani memiliki dokumen rencana aksi komunitas yang berisi rencana pengurangan risiko bencana dan memiliki rencana kegiatan tahunan untuk program destana. Karena

dokumen RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana 5 tahunan sehingga dalam RPB tidak ada rincian spesifik mengenai target tahunan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kedua, realisasi anggaran. Berdasarkan laporan realisasi APBDesa Srimartani, anggaran sebesar Rp 14,125,000.00, di tahun 2017 dan Rp 61,703,160.00 di tahun 2018 yang disediakan untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat keduanya terealisasi sebesar 100%. Walaupun secara dokumen antara yang dianggarkan dan direalisasikan itu sama, tetapi dalam proses penganggaran belum terlaksana prinsip *good governance* yaitu tidak ada akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat.

Tidak adanya laporan keuangan membuat publik tidak dapat mengetahui output atau capaian apa saja yang sudah didapatkan dengan realisasi anggaran yang mencapai 100%. Laporan keuangan penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi selain itu juga untuk mengukur efisiensi.

Ketiga, partisipasi masyarakat pada kegiatan destana di Desa Srimartani

dilakukan dalam empat bentuk. Partisipasi buah pikiran dilakukan dengan menyampaikan ide dan gagasan saat musrenbangdes dan pertemuan rutin FPRB. Partisipasi tenaga dilakukan pada saat kegiatan simulasi, pelatihan, hingga tanggap darurat. Partisipasi dalam bentuk ketrampilan dilakukan oleh relawan FPRB pada saat kegiatan simulasi, pelatihan, hingga tanggap darurat. Sedangkan partisipasi harta benda dilakukan masyarakat dengan meminjamkan peralatan dan memberikan konsumsi saat kegiatan simulasi dan terdapat bencana. Masyarakat yang ikut menjadi anggota relawan FPRB memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dibanding dengan masyarakat secara umum. Karena pada bentuk partisipasi buah pikiran relawan dapat menyampaikan gagasannya ketika rapat rutin dan untuk partisipasi ketrampilan relawan dibekali dengan ketrampilan sesuai dengan sektor masing-masing.

Keempat, perlindungan kelompok rentan. Jumlah kelompok rentan di Desa Srimartani berdasarkan data penduduk pada buku monografi Desa Srimartani tahun 2018 adalah 14 jiwa difabel, 1014 jiwa usia lanjut (usia 65 ke atas), serta 4029 jiwa usia bayi, balita, dan anak (usia 0-15 tahun). Perlakuan khusus yang seharusnya diterima kelompok rentan

adalah dalam hal aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan (Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, perlakuan khusus terhadap kelompok rentan dipraktikkan dengan cara kelompok rentan dievakuasi terlebih dahulu. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan pada video dokumentasi simulasi bencana di Desa Srimartani. Pada video dokumentasi simulasi longsor dan banjir yang pernah dilaksanakan di Desa Srimartani terlihat lansia dan anak-anak digendong oleh relawan dan TNI untuk segera dievakuasi.

Kelima, hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program destana adalah jumlah anggota relawan FPRB yang menghadiri pertemuan rutin dan kegiatan destana masih minim. Jumlah relawan FPRB Srimartani saat ini berdasarkan jumlah anggota grup Whatsapp adalah 59 anggota, tetapi dari total jumlah anggota hanya sekitar 10 anggota yang hadir saat pertemuan rutin dan 20-25 anggota yang aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas relawan. Menurut Amat Yani dan Puji selaku relawan hal tersebut dikarenakan anggota relawan FPRB merupakan pekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan FPRB.

c. Monitoring evaluasi program destana

Program destana dibentuk pada November 2017, di tahun 2018 belum ada monitoring dan evaluasi terhadap program destana. Satu-satunya bentuk pemantuan dari BPBD hanya melalui hipunan FPRB kabupaten untuk *update* informasi terkait pelaksanaan destana di level desa. Kendala mengapa kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan adalah karena instrumen untuk melakukan monev masih dalam kajian BNPB sehingga belum dapat diterapkan.

4. Produk (*Product*)

Product dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai keberhasilan program. Pada indikator *product* ini akan dinilai sejauh mana tujuan program destana di Desa Srimartani tercapai, yang dapat dilihat dari sejauh mana ketahanan masyarakat telah terbangun.

a. Hasil program destana

Pertama, kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat Desa Srimartani.

Tabel 2. Kegiatan sosialisasi dan simulasi untuk masyarakat Desa Srimartani tahun 2017-2018

No	Kegiatan	Waktu & tempat	Jumlah peserta	Pelaksana
1	Sosialisasi destana	November 2017	Tidak ada absensi	BPBD Bantul
2	Sosialisasi destana	November 2017	Tidak ada absensi	BPBD Bantul

3	Simulasi longsor	2017 di Dusun Sanansari dan Bulusari	Tidak ada absensi	FPRB Srimartani
4	Simulasi banjir	21 April 2018 di Dusun Wanujoyo Kidul	Tidak ada absensi	FPRB Srimartani
5	Sosialisasi dan Simulasi longsor	2018 di Dusun Tambalan	+/-100 KK	FPRB Srimartani

Sosialisasi mengenai program destana kepada masyarakat dilakukan sebanyak dua kali oleh BPBD Bantul. Sedangkan kegiatan simulasi telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada tahun 2017 simulasi longsor dilaksanakan satu kali di Dusun Sanansari dan Bulusari. Pada tahun 2018 terdapat 2 kali simulasi yaitu simulasi banjir di Dusun Wanujoyo Kidul dan simulasi longsor di Dusun Tambalan. Simulasi merupakan latihan teknis bagi relawan FPRB dan masyarakat supaya mengetahui tindakan serta peran apa yang dapat dilakukan pada saat bencana terjadi.

Kedua, kegiatan peningkatan kapasitas untuk relawan FPRB Srimartani.

Tabel 3. Kegiatan peningkatan kapasitas relawan FPRB Desa Srimartani tahun 2017-2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Jumlah peserta	Pemateri
1	PPGD	2017 di Balai Desa Srimartani	20-25 orang	PMI
2	PPGD	November 2018 di Balai Desa Srimartani	20-25 orang	PMI
3	SAR	November 2018	1-2 orang	Satgas SAR DIY
4	PPGD, vertical & water rescue	2018 di Desa Selopamiro Imogiri	25 orang	FPRB Srimartani

Berdasarkan informasi pada tabel di atas materi peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan untuk relawan FPRB Srimartani adalah mengenai PPGD dan evakuasi.

Ketiga, terdapat sistem peringatan dini. Desa Srimartani memiliki 2 alat *early warning system* untuk bencana tanah longsor, yaitu *ews* dari BPBD Bantul dan *ews* semi manual berupa alarm sederhana yang dibuat oleh FPRB. *EWS* dari BPBD hanya berjumlah 1 buah yang terletak di Dusun Pos Piyungan, padahal Desa Srimartani memiliki 6 dusun yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap longsor. Peringatan mengenai bencana selain melalui *ews* juga diinformasikan melalui whatsapp grup dan sistem peringatan dini tradisional seperti kentongan dan alat pengeras suara di masjid dan mushola.

Keempat, terdapat jalur dan rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul. Jalur evakuasi, titik kumpul sementara, dan titik kumpul akhir merupakan salah satu bagian dari rencana evakuasi. Di Desa Srimartani telah disepakati jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap dusun. Tetapi hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Mei ke wilayah dusun di Desa Srimartani belum terdapat rambu-rambu mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul.

b. Dampak program destana

Pertama, pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa setiap warga memiliki pengetahuan dan kesadaan yang berbeda-beda. Kesadaran masyarakat muncul sebagian besar karena kejadian longsor sudah pernah terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Selain itu juga dipengaruhi oleh apakah di dusun tersebut sudah pernah dilaksanakan kegiatan desa tangguh bencana atau belum. Tetapi secara umum disampaikan oleh relawan FPRB bahwa pengetahuan masyarakat telah meningkat karena FPRB secara aktif selalu membagikan informasi kepada masyarakat tidak hanya melalui forum resmi seperti sosialisasi dan simulasi tetapi juga melalui sosial media.

Kedua, tindakan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB Srimartani masyarakat Desa Srimartani sudah beberapa kali melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan risiko. Bencana yang paling sering terjadi di Desa Srimartani adalah angin kencang dan longsor. Pencegahan atau pengurangan risiko yang dilakukan masyarakat dan relawan adalah memotong dahan pohon yang rawan terkena angin kencang dan juga menutup rekahan tanah menggunakan

terpal supaya saat hujan tidak semakin melebar dan menyebabkan longsor.

Ketiga, keberhasilan masyarakat dan relawan FPRB dalam merespon bencana. Badai cempaka yang terjadi pada 28-30 November 2017 merupakan pengalaman pertama bagi relawan FPRB dan masyarakat dalam merespon bencana setelah program destana mulai dibentuk. Ketua FPRB Desa Srimartani menyampaikan bahwa dalam penanganan tanggap darurat badai cempaka relawan FPRB telah berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan sektor masing-masing.

Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan diantaranya adalah melakukan evakuasi korban, melakukan pertolongan pertama, membangun posko, menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat, dan melakukan kaji cepat pendataan bencana. Selain relawan FPRB masyarakat juga ikut berpartisipasi seperti ibu-ibu yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) membantu di dapur umum, pemuda karang taruna membantu *assessment* awal, dan bapak-bapak membantu evakuasi serta kerja bakti. Walaupun begitu Amat Yani menilai kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pada saat badai cempaka belum dijalankan secara maksimal.

Keempat, prestasi Desa Srimartani. Desa Srimartani pada 5 Desember 2018

berpartisipasi dalam lomba desa tangguh bencana se-provinsi DIY mewakili Kabupaten Bantul. Hasil penilaian lomba adalah sarana prasarana yang dimiliki sudah cukup mendukung dan simulasi longsor telah dilaksanakan dengan baik (Tribunjogja.com, 2018). Sedangkan kekurangan Desa Srimartani terletak pada dokumen. Desa Srimartani tidak juara tetapi mendapatkan piagam penghargaan dari BPBD DIY karena dinilai telah berperan aktif dalam pengelolaan ketangguhan desa atau kelurahan DIY.

c. Keberlanjutan program destana

Keberlanjutan pelaksanaan program destana di Desa Srimartani memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Bentuk komitmen BPBD Bantul adalah dengan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dengan baik. Bentuk komitmen Pemerintah Desa Srimartani adalah mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMDesa Srimartani tahun 2019-2024, adanya alokasi anggaran untuk program destana di tahun 2019, dan menjalin kerjasama dengan UMY dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam pembuatan rencana kontinjensi multi hazard di Desa Srimartani. Bentuk komitmen FPRB Srimartani adalah menjalankan kegiatan pengurangan risiko bencana. Bentuk

komitmen masyarakat adalah dengan berpartisipasi dalam program destana.

KESIMPULAN

1) Context

Indikator context telah optimal karena tujuan yang ditetapkan dalam program destana telah sesuai untuk menjawab permasalahan risiko ancaman bencana di Desa Srimartani. Tujuan FPRB Srimartani dalam program destana adalah mengurangi risiko ancaman bencana melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan relawan. Kegiatan peningkatan kapasitas akan membangun ketahanan masyarakat untuk siap menghadapi bencana.

2) Input

Input berupa sumber daya dan strategi telah optimal karena telah dipersiapkan dengan baik. Pada parameter sumber daya telah terbentuk kelembagaan FPRB, ada alokasi anggaran dari APBD Bantul dan APBDesa Srimartani, dan sarana prasarana telah cukup untuk mendukung kinerja relawan FPRB. Sedangkan untuk parameter strategi telah ditetapkan peraturan Desa Srimartani No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, telah disusun dokumen RPB dan rencana kontinjensi longsor, RPB telah terintegrasi dengan RKP Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018 serta Pemerintah Desa Srimartani telah menjalin kerjasama.

3) *Process*

Kegiatan program destana di Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018 sudah berjalan walaupun belum secara optimal. Implementasi kegiatan peningkatan kapasitas telah sesuai dengan dokumen RPB, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif, dan prinsip perlindungan kelompok rentan telah dilaksanakan. Parameter yang belum optimal terletak pada tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan keuangan dan laporan kegiatan program destana, kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan, dan minimnya relawan FPRB yang aktif.

4) *Product*

Pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani pada tahun 2017 dan 2018 telah menunjukkan hasil dan memberikan dampak kepada sebagian masyarakat di Desa Srimartani. Hasil dari kegiatan destana adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan relawan, serta adanya sistem peringatan dini. Dampak kegiatan destana adalah masyarakat mampu melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana dan berpartisipasi saat tanggap darurat. Belum optimalnya indikator *product* ini terletak pada kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat baru dilaksanakan di empat

dusun dari tujuh belas dusun yang ada. Selain itu rambu-rambu untuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum terpasang di seluruh dusun di Desa Srimartani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal

Ahmad Buchari, M. B. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol 3, No 1, Juni, 49-62.

Fatimahsyam. (2018). Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pendekatan Mazhab Antroposentris. *Jurnal Ar Raniry*, Vol 20, No 1, April 2018, 49-65.

Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan Masyarakat : Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol III, No 1, 69-84.

Kusumaratih, A. (2016). Manajemen Desa Tangguh Bencana Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Adinegara*, Vol 5, No 1, 1-15.

Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi. *Junral Unida*, Vol 6, No 1, Juni 2011, 111-125.

Merrynga Anggriani, E. T. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Mulyodadi Kabupaten Bantul.

- Jurnal Bumi Indonesia, Vol 7, Nomer 2, 1-11.*
- Miftakhul Munir, P. H. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kendal Tahun 2016 . *Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 3, 1-15.*
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas, Vol 3, No 1, Januari 2017, 1-16.*
- Nur Aini, I. F. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol. 03 No. 2 Tahun 2018, 50-61.*
- Dokumen**
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Risiko Bencana Indonesia* . Jakarta: BNPB.
- FPRB Srimartani. (2018). *Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Desa Srimartani Tahun 2018-2021*. Bantul: Pemerintah Desa Srimartani
- FPRB Srimartani. (2018). *Rencana Penanggulangan Bencana Desa Srimartani* . Bantul: Pemerintah Desa Srimartani.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srimartani Tahun 2017 dan 2018
- Pemerintah Desa Srimartani. (2018). *Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2018*. Bantul: Pemerintah Desa Srimartani.
- Pemerintah Desa Srimartani (2017 dan 2018). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Srimartani Tahun 2017 dan 2018. Bantul: Pemerintah Desa Srimartani
- The International Institute Of Rural Reconstruction (IIRR) Dan Give 2 Asia . (2017). *Building Community Resilience : Mapping The Journey Of Local Community Based Ngos In Developing Sustainable Preparedness Programs*. IIRR And Give 2 Asia.
- Peraturan**
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Pemerintah Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Website**
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018, 12 15). *Data Informasi Bencana Indonesia*. Retrieved from BNPB Web site: <https://bnpb.cloud/dibi/>
- BPBD Kabupaten Bantul. (2016, Maret 17). *Berita : Bantul Siapkan Desa Srimartani menjadi Desa Tangguh Bnencana*. Retrieved from BPBD Kabupaten Bantul: <https://bpbd.bantulkab.go.id/bantul-siapkan-desa-Srimartani-menjadi-desa-tangguh-bencana/>
- Berita Online**
- Krjogja.com. (2016, September 29). 15 Desa Zona Merah di Bantul Rawan Longsor. https://krjogja.com/web/news/read/11120/15_Desa_Zona_Merah_di_Bantul_Rawan_Longsor?f_b_comment_id=1269557993063008_1269728453045962
- Tempo.co. (2018, Desember 18). Kerugian Akibat Bencana 22 T, Sri Mulyani: It's Not a Small Money. *Tempo.co*: <https://bisnis.tempo.co/read/1156348/kerugian-akibat-bencana-22-t-sri-mulyani-its-not-a-small-money>
- Tribun Jogja.com. (2018, November 25). BPBD Bantul Anggarkan Rp1 Miliar untuk Pembentukan 5 Desa Tanggap Bencana Tahun Depan. *TribunJogja*: <http://jogja.tribunnews.com/2018/1>

1/25/bpbd-bantul-anggarkan-rp1-
miliar-untuk-pembentukan-5-desa-
tanggap-bencana-tahun-depan